



KONFLIK KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN WISATA RELIGI DI DESA BOGORAN

Putri fadhilah Helmi

Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

Email: putrihelmi449@gmail.com

Kata

kunci:

Conflict of
Interest,
Resolution,
Implementation,
Religious Tourism

ABSTRAK

Latar Belakang : Konflik kepentingan dalam implementasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena konflik terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat yang dimotori oleh Pemuda karena perbedaan kepentingan. Pemerintah desa memiliki kepentingan politik kekuasaan sedangkan masyarakat memiliki kepentingan ekonomi.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan yang terjadi, resolusi konflik, dan menganalisis implementasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran, kecamatan Sapuran, Wonosobo.

Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan wisata religi di Desa Bogoran, terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Konflik ini yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak ideal sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III. Namun konflik ini akhirnya bisa diselesaikan meskipun pembangunan tetap dilaksanakan tanpa keterlibatan pemerintah desa.

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terjadi konflik dalam implementasi pembangunan wisata religi. Konflik tersebut menurut teori Lewis A. Coser disebabkan kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa yang tidak merespon keinginan masyarakat. Selanjutnya konflik disebabkan karena perbedaan kepentingan. Dan diselesaikan dengan musyawarah. Adapun implementasi dari pembangunan ini menggunakan swadaya masyarakat baik dari tenaga, pikiran, maupun biaya, dan tanpa melibatkan pemerintah desa.

ABSTRACT

Background: Conflicts of interest in the implementation of religious tourism development in Bogoran Village are interesting to be examined because conflicts occur between the village government and the community led by youth due to differences in

interests. Village governments have power politics while communities have economic interests.

Keywords:

*Conflict of Interest,
Resolution,*

Implementation,

Religious Tourism

Purpose: This study aims to determine conflicts of interest that occur, conflict resolution, and analyze the implementation of religious tourism development in Bogor Village, Sapuran District, Wonosobo.

Method: The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection methods of interviews, observations, and documentation.

Results: The results of this study show that in the development of religious tourism in Bogor Village, there is a conflict between the community and the village government. This conflict causes development to be not ideal in accordance with the theory of implementation according to Edward III. However, this conflict was eventually resolved even though development was carried out without the involvement of the village government.

Conclusion: The conclusion of this study is that there is a conflict in the implementation of religious tourism development. The conflict according to Lewis A. Coser's theory was caused by disappointment from the community with the village government that did not respond to the wishes of the community. Furthermore, conflicts are caused due to differences in interests. And it was resolved by deliberation. The implementation of this development uses non-governmental organizations both from energy, thought, and cost, and without involving the village government

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan instrumen baru kombinasi antara dua hal yaitu inisiatif lokal dari bawah dan respon kebijakan (Lindawaty, 2023; Nomor, 6AD). Undang-Undang tersebut menjadi semangat bagi masyarakat desa untuk berlomba-lomba mencari ide dan gagasan memajukan desa dengan inovasi-inovasi baru.

Dorongan untuk memajukan desa tentunya lahir dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, terutama faktor ekonomi. Kondisi ekonomi desa menjadi faktor terbesar masyarakat berinovasi untuk mentransformasikan desa menjadi lebih maju. Begitupun masyarakat Desa Bogor (Kehik & Mael, 2017; Saphira, 2022). Kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya gagasan menjadikan potensi desa sebagai salah satu sumber ekonomi yang menguntungkan Masyarakat (Habib, 2021; Sukmawan & Kholifah, 2024).

Desa Bogor mengalami penurunan Indeks Desa Membangun (IDM) yang drastis. Pada Tahun 2020, Indeks Desa Membangun Desa Bogor adalah 0,7500, di mana itu masuk ke dalam kategori desa yang maju. Namun pada tahun 2022, Indeks Desa Membangun Desa Bogor mengalami penurunan yaitu 0,6948, di mana kategori Desa Bogor juga menjadi berubah yang semula maju kembali menjadi desa berkembang. Adapun salah satu komposit dari Indeks Desa Membangun adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang dari tahun 2020 sampai 2022 tetap statis di angka 0,5833, di mana itu

masih dalam kategori tertinggal (Nugroho, 2018; Santoso, Muntasib, Kartodihardjo, & Soekmadi, 2015). Artinya peningkatan ekonomi memang menjadi urgensi dari Desa Bogoran.

Gagasan tentang dibangunnya Wisata Religi pertama kali digagas oleh salah satu anggota organisasi Pemuda Dusun Wadas Desa Bogoran bernama Udiyanto. Pemuda Dusun Wadas adalah sebuah organisasi di Dusun Wadas yang beranggotakan seluruh pemuda dari umur 17-45 tahun di Dusun Wadas. Ia melihat potensi keindahan alam curug Mandiran yang terletak di Dusun Wadas, Desa Bogoran ini dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi apabila dijadikan wisata. Ditambah adanya makam leluhur Dusun Wadas, Desa Bogoran yang merupakan seorang pangeran sekaligus ulama atau syekh dari Kesultanan Mataram bernama Raden Cokrohadikusumo atau dikenal oleh masyarakat desa dengan nama Mbah Mandir yang bersemayam di dekat curug Mandiran juga dapat dijadikan tempat peziarahan yang memiliki nilai spiritual dan religi yang kuat.

Namun rencana ini tidak melibatkan pemerintah desa. Hal ini dilatarbelakangi kekecewaan pemuda dusun dengan kinerja pemerintah desa, diantaranya, Pemerintah tidak transparan dan tidak memberikan keterangan apapun ketika ditanya terkait kas sewa tratag desa, padahal masyarakat berhak tahu apakah pelaksanaan penyewaan tratag sebagai salah satu usaha milik desa tersebut untung atau rugi karena hasilnya akan kembali untuk pembangunan. Dari kekecewaan tersebut, Pemuda bermaksud untuk mandiri melakukan perencanaan pembangunan wisata religi di Dusun Wadas, Desa Bogoran. Sehingga konflik pun terjadi.

Penelitian ini menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi dalam implementasi pembangunan wisata religi, penyelesaiannya, dan bagaimana pembangunan diimplementasikan tanpa keterlibatan pemerintah desa (Iskandar, 2020). Dengan tujuan, mengetahui konflik kepentingan yang terjadi, penyelesaian atau resolusi konflik, dan implementasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan penelitian secara jelas sesuai dengan kenyataan di lapangan (Yuliani, 2018). Objek dari penelitian ini adalah pembangunan wisata religi di Desa Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori konflik menurut Lewis A. Coser yang menganalisis penyebab konflik dari eberapa sebab. Teori resolusi konflik menurut Ralf Dahrendolf yang membagi penyelesaian dalam tiga jenis yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ada pula penyelesaian konflik dengan budaya lokal yaitu musyawarah mufakat sesuai sila ke-4 Pancasila (Fadli, 2021). Dan teori implementasi dari Edward III, yang menganalisis implementasi dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan disposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bogoran, khususnya Dusun Wadas adalah dusun yang memiliki potensi wisata religi, terdiri dari wisata alam Curug Mandiran dan Makam leluhur yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Masyarakat Dusun Wadas melihat ini sebagai sebuah anugerah dari

Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Pembangunan Wisata Religi Di Desa Bogoran

Sang Pencipta yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi membangkitkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terutama ekonomi. Kesadaran masyarakat akan urgensi adanya alternatif membangkitkan kondisi ekonomi sudah bergaung sejak lama. Maksud masyarakat ini juga sudah disampaikan secara struktural melalui birokrasi yang ada di desa. Respon pemerintah desa dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi hal yang ditunggu.

Sampai di tahun 2020, belum ada respon dari pemerintah desa terkait aspirasi pemanfaatan potensi wisata religi yang ada di Dusun Wadas tersebut. Kemudian untuk pertama kalinya gagasan pembangunan wisata religi disampaikan oleh Ketua Pemuda Dusun Wadas secara langsung dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemuda Dusun Wadas dalam rangka menyampaikan maksud rencana pembangunan wisata religi dan meminta pandangan dari masyarakat Dusun Wadas Desa Bogoran. Forum musyawarah ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 di balai dusun Wadas dan dihadiri oleh ketua dan anggota Pemuda Dusun Wadas, tokoh masyarakat, dan masyarakat Dusun Wadas.

Alasannya, dijelaskan oleh ketua Pemuda Dusun Wadas, Udiyanto, dilatarbelakangi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Konflik tersebut berupa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, keinginan masyarakat atas pemanfaatan potensi wisata ini sudah disampaikan kepada pemerintah desa beberapa kali. Namun, sama sekali tidak ada respon dari pihak pemerintah desa.

Selain itu, Hal ini dilatarbelakangi kekecewaan pemuda dusun dengan kinerja pemerintah desa, diantaranya, Pemerintah tidak transparan dan tidak memberikan keterangan apapun ketika ditanya terkait kas sewa tratag desa, padahal masyarakat berhak tahu apakah pelaksanaan penyewaan tratag sebagai salah satu usaha milik desa tersebut untung atau rugi karena hasilnya akan kembali untuk pembangunan. Berdasarkan teori Lewis A. Coser, konflik realistik disebabkan karena adanya kekecewaan atas tuntutan-tuntutan yang tidak terwujud yang ditujukan khusus oleh kelompok berkepentingan pada objek yang dianggap mengecewakan. Seperti halnya yang terjadi, kekecewaan pemuda terhadap pemerintah desa menjadi penyebab konflik antara keduanya, melebar menjadi konflik masyarakat Dusun Wadas dengan pemerintah Desa. Dari konflik tersebut, pemuda Dusun Wadas sebagai penyelenggara musyawarah memutuskan untuk tidak melibatkan pemerintah desa dalam pembahasan ini. Dari musyawarah yang dilaksanakan tersebut, masyarakat Dusun Wadas mendukung penuh dengan gagasan pembangunan wisata religi di Dusun Wadas. Dan karena tidak ada respon dari pemerintah Desa selama ini, maka disepakati bahwa pembangunan ini akan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Dusun Wadas yang dimotori oleh Pemuda Dusun Wadas.

Mengetahui adanya musyawarah rencana pembangunan wisata religi, barulah pemerintah desa yang dikepalai oleh Bapak Tugiyantoro memanggil Udiyanto dan Agus Rame selaku Ketua panitia dan wakil sekaligus pelopor ide pembangunan untuk membahas hal tersebut. Namun, berdasarkan keterangan BPD, Bapak Sabar, pertemuan ini justru menjadi penyebab konflik selanjutnya, yaitu perbedaan kepentingan antara pemerintah desa dengan masyarakat Dusun Wadas yang dimotori oleh pemuda Dusun Wadas. Perbedaan kepentingan yang dimaksud adalah, di mana pemerintah desa selama ini tidak merespon adanya gagasan pembangunan wisata religi karena penggagasnya bukan berasal dari pendukung Kepala Desa beserta jajarannya yang saat ini sedang duduk di pemerintah desa, penggagas tersebut yaitu tokoh-tokoh pemuda Dusun Wadas yang pada saat pemilihan kepala desa memiliki keberpihakan politik yang berbeda, dan pembangunan wisata religi ini bukan merupakan produk kebijakan pemerintah desa, serta tidak diprogramkan dalam APBDes berdasarkan keinginan masyarakat untuk peningkatan ekonomi.

Perbedaan kepentingan ini menjadi sebab munculnya konflik kedua, di mana pemerintah desa memiliki kepentingan politik kekuasaan sedangkan masyarakat Dusun wadas yang dimotori pemuda memiliki kepentingan ekonomi yang karena kekecewaan

yang ditimbulkan di awal. Merujuk pada teori konflik, dalam hal ini, konflik yang terjadi antara pemerintah desa dan pemuda disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Di mana pemerintah desa memiliki kepentingan politik, sedangkan pemuda memiliki kepentingan ekonomi bersama masyarakat. Kepentingan ini tidak menemukan titik temu untuk bisa sejalan hingga saat ini.

Sesuai dengan teori resolusi konflik menurut teori Ralf Dahrendorf. Penyelesaian konflik dapat menggunakan tiga cara, yaitu konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Konsiliasi sendiri adalah upaya penyelesaian konflik yang berusaha mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan keluar bersama yang disepakati. Resolusi konflik yang satu ini sesuai dengan yang terjadi di dalam konflik pembangunan ini. Adapun metode yang dipakai juga dilandaskan pada salah satu sila Pancasila, yaitu sila ke empat. Nilai yang diambil adalah memutuskan suatu perkara atau masalah dengan musyawarah mufakat.

Berdasarkan teori implementasi menurut Edward III, implementasi sebuah kebijakan atau program dianalisis berdasarkan empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi (Subekti, Faozanudin, & Rokhman, 2017).

Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat Dusun Wadas terutama pemuda dalam implementasi pembangunan wisata religi ini kurang lancar. Sejak awal, aspirasi yang masuk ke pemerintah desa terkait wisata religi ini tidak diakomodir dan tidak mendapat respon dari pemerintah desa. Selanjutnya, karena kekecewaan dan perbedaan kepentingan, tentunya berdampak pada komunikasi yang terjalin (Syarif & Unde, 2014).

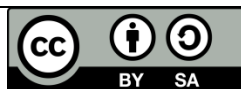
Menurut teori Edward III, sumber daya dalam sebuah implementasi program, meliputi empat komponen, yaitu, staf yang cukup baik jumlah maupun kualitas, informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan fasilitas yang mumpuni (Setyawan & Srihardjono, 2016). Adapun dalam implementasi pembangunan wisata religi ini, sumber daya manusia cukup baik karena berasal dari swadaya masyarakat yang bergotong-royong membangun Pahlewi, Purnamasari, & Gumilar, (2020), di mana ini sangat mendukung jumlah atau kuantitas dari SDM yang diperlukan. Adapun kualitas SDM diperoleh dari tenaga-tenaga ahli yang memang dibayar untuk merancang dan membangun wisata religi ini. Kekurangannya adalah pada bagian kewenangan dan fasilitas. Di mana karena pembangunan ini dilakukan tanpa melibatkan pemerintah desa, tentunya kewenangan dan fasilitas tersebut terbatas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terjadi konflik dalam pembangunan wisata religi di Desa Bogoran yang terjadi antara masyarakat yang dimotori pemuda dengan pemerintah desa. Hal ini disebabkan kekecewaan pemuda dengan kinerja pemerintah desa yang tidak merespon aspirasi masyarakat kaitannya karena ada unsur perbedaan pandangan politik dan kepentingan. Hal ini membuat masyarakat memutuskan membangun wisata religi tanpa melibatkan pemerintah. Selanjutnya, konflik diselesaikan dengan musyawarah dari pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun sebenarnya hasil dari musyawarah tersebut tetap, bahwa masyarakat tidak akan melibatkan pemerintah desa. Kemudian implementasi pembangunan menggunakan swadaya masyarakat baik dari unsur materi maupun non materi. Satu-satunya tujuan dari masyarakat terlepas dari kepentingan pemerintah desa adalah meningkatkan ekonomi dan melestarikan makam leluhur dengan adanya pembangunan wisata religi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Iskandar, A. Halim. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Kehik, Bernardus Seran, & Mael, Medan Yonathan. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Agrimor*, 2(04), 59–62.
- Lindawaty, Debora Sanur. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21.
- Nomor, Undang Undang. (6AD). tahun 2014 tentang Desa.
- Nugroho, Hanantyo Sri. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Journal of Governance*, 3(1).
- Pahlewi, Diena, Purnamasari, Hanny, & Gumilar, Gun Gun. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald van Metter Dan Carl van Horn. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 412–423.
- Santoso, Heri, Muntasib, EKSH, Kartodihardjo, Hariadi, & Soekmadi, Rinekso. (2015). Peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. *Forestry Research, Development and Innovation Agency*.
- Saphira, Khoirunnisa. (2022). Transformasi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Socio Religia*, 2(1).
- Setyawan, Dody, & Srihardjono, Nanang Bagus. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Subekti, Mening, Faozanudin, Muslih, & Rokhman, Ali. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
- Sukmawan, Yoga Dedy, & Kholifah, Emy. (2024). Konflik Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pageant Serta Hubungannya dengan Pengembangan Pariwisata. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3).
- Syarif, Ahmad, & Unde, Andi Alimuddin. (2014). Pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penyelenggaran penanggulangan bencana di Kota Makassar. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 142–152.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).